

SINOPSIS

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia juga berpengaruh pada perkembangan transmigrasi saat ini. Berdasarkan beberapa data yang diperoleh, banyak kawasan-kawasan transmigrasi yang melakukan pemekaran untuk membentuk sebuah desa mandiri. Desa Kumpai Batu Bawah merupakan Desa Eks Transmigrasi di Kalimantan Tengah sejak tahun 1974, sebagian besar masyarakatnya berasal dari daerah Jawa Timur. Desa ini merupakan salah satu desa eks transmigrasi yang berdasarkan pengamatan perkembangan pembangunannya cukup lambat, jika dibandingkan dengan desa tetangganya yaitu Desa Kumpai Batu Atas serta desa-desa eks transmigrasi lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Desa ini berkembang baru 5 tahun ini, inilah yang akan peneliti ungkapkan, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan desa-desa terutama desa eks transmigrasi tanpa pengecualian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode Deskriptif Kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau masalah yang terjadi sebagaimana adanya untuk memberikan tafsiran terhadap setiap pokok permasalahan dengan berdasarkan data empiris, seperti studi kasus, pengamatan, wawancara maupun olah data. Unit analisisnya yaitu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah terhadap Desa Eks Transmigrasi Kumpai Batu Bawah. Indikator pembahasannya adalah peran pemerintah daerah sebagai pengarah dan pembimbing, pembina, penyedia dana serta pengawasan dalam pengembangan desa.

Hasil penelitian ini pada peran pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengembangan Desa Eks Transmigrasi Kumpai Batu Bawah dalam 4 peran sebagai pengarah dan pembimbing, pembina, penyedia dana serta pengawasan yaitu pemerintah daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mengatur desa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pusat yang disesuaikan pada prioritas daerahnya menuju peningkatan pembangunan daerah secara menyeluruh. Peran itu salah satunya dapat dilihat dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang direalisasikan sesuai RPJMDesa Kumpai Batu Bawah. Namun, dalam proses implementasi pemberdayaan di Desa tersebut Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, dikarenakan kurang koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah.

Saran dari permasalahan yang terjadi adalah dengan mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pemerintah Desa Kumpai Batu Bawah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, serta adanya tindak lanjut atas setiap kebijakan yang dibuat, tidak berhenti pada perencanaan saja, tetapi implementasinya juga perlu ditingkatkan.